

MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM: LATAR BELAKANG, CAKUPAN DAN POLA

Rustam Ependi

Dosen STAI Al Hikmah Tanjung Balai
Jl. Karya No. 26 Tj. BalaiKota I, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21332
rustamependi6@gmail.com

***Abstract:** Radicalism and Liberalism Thought turned out to have an Influence on the Development of Islamic Education in Indonesia. In the case of the Islamic Education movement Indonesian students may be the most important contemporary channel for Islamist ideas from the Middle East to Indonesia. Thousands of Indonesian students receive scholarships from Middle Eastern Islamic countries to study at leading universities. While Liberalism also has an influence in the development of Islamic education in Indonesia with an Indonesian nuance. The concepts and ideas about Islamic education are clearly seen in his ideas on the renewal of Islamic education, in aspects of Islamic education, starting from the vision, mission, goals, curriculum, management and leadership.*

***Keywords:** Modernization, Education, Islam.*

Pendahuluan

Paradigma Liberalisme dalam memberikan makna tentang kebebasan sering di terjemahkan dalam makna yang tidak pada tempatnya. Pemahaman liberal cenderung mengarah kepada kebebasan tanpa batas, walaupun ada sebagian para penggerak paham liberal, bahwa liberal juga punya batasan tentang sebuah kebebasan antara individu dan sosial. Namun dalam realita makna kebebasan hanya terbatas pada ranah individu, bukan kebebasan dalam makna secara universal

Liberalisme dalam perkembangan dan kelanjutannya, telah masuk dalam ranah tidak sebatas masalah ekonomi, sosial, budaya dan berbagai bidang yang lain. Bahkan liberalisme telah mengarah masuk keranah agama Islam. Sehingga dengan kondisi liberalisme masuk dalam makna keagamaan, telah mengalami sebuah dilemma dalam penafsiran. Sebab paham liberal dalam menafsirkan Islam cenderung mengarah pada daya akal, tanpa melihat sisi teks maupun konteks secara tepat, padahal ajaran Islam dalam mengajarkan sebuah tafsir harus melalui berbagai paradigma secara kaffah, bukan hanya sebatas satu sisi belaka.

Pemikiran Keagamaan di Indonesia sebagai Faktor Pembentuk Modernisasi Pendidikan Islam

a. Radikalisme

Radikalisme paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik.¹ yang umumnya dilihat dengan mempertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Menurut Mudjahirin Ada beberapa pendapat dan versi dalam mendefinisikan radikalisme ini, diantaranya ada yang berpendapat bahwa kata radikal itu berasal dari kata latin “radix” yang artinya akar atau pohon. Jadi orang yang radikal sebenarnya adalah orang yang mengerti sebuah permasalahan sampai ke akar-akarnya, dan karena itu mereka lebih sering memegang teguh sebuah prinsip dibandingkan orang yang tidak mengerti akar masalah. Pengertian lain mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan radikal atau radikalisme itu adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal.² Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.³

Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Apabila kita melihat dari sudut pandang sejarah kemunculan gerakan radikalisme Islam di Indonesia bukanlah suatu fenomena yang baru. Bermula dari kekecewaan umat Islam di Indonesia waktu itu terkait penentuan dasar Negara. Ketika itu usulan dari tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hasan mengenai pengakuan Islam sebagai agama resmi Negara,

¹ <https://kbbi.web.id/radikalisme> dikutip tanggal 4 Desember 2017

² https://www.academia.edu/8405542/DERADIKALISME_KEAGAMAAN, dikutip tanggal 4 Desember 2017

³ A.Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 33.

hingga kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya (yang dikenal dengan Piagam Jakarta) ditolak oleh sebagian besar anggota sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Meskipun penolakan tersebut akhirnya dapat diterima dengan beberapa pertimbangan dan alasan, umat Islam pada waktu itu memandang hal tersebut sebagai tindakan penipuan dan pengkerdilan cita-cita umat Islam.⁴

Adapun menurut Zada Khammami, kemunculan radikalisme Agama (Islam Radikal) di Indonesia ditengarai oleh dua faktor. *Pertama*, faktor internal dari dalam umat Islam sendiri. Faktor ini terjadi karena adanya penyimpangan norma-norma agama. Kehidupan sekuler dalam kehidupan masyarakat mendorong mereka untuk kembali pada otentitas (*fundamen*) Islam. Faktor ini ditopang dengan pemahaman agama yang totalistic (*kaffah*) dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami teks-teks agama. Kajian terhadap agama hanya dipandang dari satu arah yaitu *tekstual*, tidak melihat dari faktor lain, sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan harus merujuk pada perilaku Nabi secara literal. *Kedua*, faktor eksternal di luar umat Islam yang mendukung terhadap penerapan syari'at Islam dalam sendi-sendi kehidupan.⁵

Kelompok radikal memiliki ciri-ciri menurut Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme Islam. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan. *Kedua*, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Alquran dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. *Ketiga*, karena perhatian lebih terfokus pada teks Alquran dan hadits, maka Radikalisme ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. *Keempat*, menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Alquran dan hadith.

⁴ Akhmad Elang Muttaqin, "Mengakrabi Radikalisme Islam" dalam Erlangga Husada, dkk. *Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 5.

⁵ Zada Khammami, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonwsi*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 7.

Kelima, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.⁶

b. Liberalisme.

Liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau kalau kita lihat dengan perspektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas, karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Liberalisme adalah paham pemikiran yang optimistis tentang manusia. Prinsip-prinsip liberalisme adalah kebebasan dan tanggung jawab. Tanpa adanya sikap tanggung jawab tatanan masyarakat liberal tak akan pernah terwujud.⁷

Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia juga berkembang pemikiran Islam yang bisa dikategorikan sebagai pemikiran Islam yang cenderung modern yaitu pemikiran Islam yang disebut dan dikenal dengan sebutan Islam Liberal. Islam liberal merupakan mazhab baru dalam pemikiran Islam di Indonesia. Kelompok Islam ini sepertinya merupakan kelompok yang berusaha melakukan interpretasi baru terhadap doktrin agama (Islam) yaitu Alquran dan Sunnah, serta interpretasi atas sejarah sosial dan konteks masyarakat Islam berdasarkan ilmu, bahasa, kritik sejarah dan studi ilmu-ilmu sosial.⁸

Munculnya berbagai corak pemikiran Islam Liberalisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kebijakan politik pembangunan di bawah rezim Orde Baru yang dirasakan oleh intelektual Islam, sangat memojokkan dan memarjinalkan kelompok Islam. Umat Islam selalu toleran membangun Orde Baru diterapkan benar-benar mengalami proses peminggiran yang dahsyat dan

⁶ A.Rubaidi, *Radikalisme Islam*, h. 63.

⁷ Budhy Munawar-Rachman. *Argumen Islam Untuk Liberalisme*. (Jakarta. Grasindo. 2010), h. 3.

⁸ Zuly Qodir. *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 46.

bertabrakan dengan arah modernisasi, terutama yang hanya mengarah pada pertumbuhan sektor ekonomi, tidak diimbangi dengan sektor religious.⁹

Pemikiran Islam Liberal di Indonesia sebenarnya mulai muncul pada 1970-an yang digerakkan oleh Harun Nasution. Taufik Abdullah menilai bahwa Nasution dapat disebut sebagai pemikir Islam Liberal paling terkemuka di Indonesia kontemporer. Dia adalah murid tokoh pembaharu Islam Muhammad Abduh. Harun Nasution menyerukan kebangkitan kembali semangat modernis yang telah membebaskan kaum muslim dari keletihan intelektual mereka. Jejak Harun Nasution banyak diikuti oleh Nurcholis Majid, Ahmad Wahib, Djohan Effendi, dan Abdurrahman Wahid. Mereka telah melancarkan pemikiran-pemikiran yang dinilai Greg Barton sebagai pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan Islam Liberal di Indonesia.¹⁰

Sumbangan terbesar John Locke terhadap kesadaran kenegaraan modern adalah bahwa pembatasan wewenang negara itu dituangkan dalam tuntutan bahwa pemerintah harus bertindak atas dasar suatu konstitusi. Tuntutan bahwa pemerintahan negara harus dijalankan berdasarkan suatu undang-undang dasar menjadi kesadaran kenegaraan modern. Pada kondisi tersebut warganegara harus mampu memformulasikan dan memutuskan keinginan-keinginannya tanpa intervensi negara. Dalam liberalisme, stabilitas politik secara luas tergantung pada kemampuan pemerintah untuk merespon keinginan warga. Supremasi hukum merupakan salah satu tonggak kebebasan individu dan tonggak demokrasi. Karena itu usaha-usaha untuk mengesampingkan tatanan prosedural atau legal dengan dalih “demi kepentingan nasional” atau karena desakan tuntutan rakyat yang semena-mena harus dianggap tidak demokratis. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa pemerintahan yang terbaik melibatkan “supremasi hukum, bukan supremasi orang-orang” Demokrasi dan kebebasan merupakan dua konsep yang amat penting dalam politik. Kebebasan atau hak-hak sipil bisa dikatakan suatu pengandaian bahwa negara punya peran positif dalam menjamin perlindungan hukum dan kesempatan yang setara bagi semua warganegara tanpa

⁹ Muh. Idris, Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia, kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014, h. 376.

¹⁰ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012), h. 132

memandang ras, agama, serta jenis kelamin. Kebebasan sipil meliputi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama serta kebebasan pers. Kalau semuanya tidak diakui dan tidak ditegakkan oleh hukum di suatu negara, maka negara itu tidak bisa disebut demokratis.¹¹

Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran baru atas agama Islam dengan wawasan berikut:

1. Keterbukaan pintu ijtihad pada semua bidang
2. Penekanan pada semangat religio-etik, bukan pada makna literal sebuah teks
3. Kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural
4. Pemihakan pada yang minoritas dan tertindas
5. Kebebasan beragama dan berkepercayaan
6. Pemisahan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.¹²

Pada tahun 1970-an muncul Harun Nasution yang dikenal sebagai tokoh "neo-mu'tazilah" aliran Islam yang sangat menekankan rasionalitas dalam iman, dan tegas mengatakan bahwa agama yang diperlukan manusia di abad XXI adalah agama yang rasional, yaitu agama yang mampu mengimbangi materialisme ilmu pengetahuan dan teknologi; agama yang nilai-nilai moralnya bersifat absolut untuk mengimbangi relativisme Barat; agama yang ritual (*'ibadah*)-nya berfungsi menghidupkan hati nurani manusia modern yang "kering" dari nilai-nilai spiritualitas keagamaan; dan agama yang ajaran humanismenya bersifat rasional dan terhindar dari ketinggalan zaman.¹³

Demikian juga Nurcholish Madjid menonjol dengan gerakan pembaruannya setelah memberikan ceramah yang menghebohkan pada 3 Januari 1970. Untuk pertama kalinya, cendekiawan Muslim ini berbicara bebas dan transparan mengenai keharusan pembaruan dalam pemikiran Islam Modernis di Indonesia. Makalah yang menghebohkan tersebut kemudian dipublikasikan oleh surat kabar Indonesia Raya, dan hal inilah yang menjadikan pemikiran Nurcholish Madjid memperoleh reputasi buruk. Makalah yang berjudul *Keharusan*

¹¹ Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*, (Jakarta : Friedrich Naumann Stiftung, 2011), h. 6

¹² Mujamil Qomar, *Fajar Baru*, h. 136.

¹³ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), h. 56.

Pembaruan Pemikiran Islam dan masalah Integrasi Umat ini mengupas secara jelas tentang sekularisasi, deskralisasi, liberalisme dan sosialisme.¹⁴ Pemikiran Islam Liberal di Indonesia juga muncul secara terang-terangan setelah terbentuknya Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Ulil Abshar Abdalla. Jaringan Islam Liberal dideklarasikan pada 8 Maret 2001. Pada mulanya JIL hanya kelompok diskusi yang merespon fenomena-fenomena sosial-keagamaan, kemudian berkembang menjadi kelompok diskusi (Milis) Islam Liberal, JIL juga bermaksud mengimbangi pemikiran kelompok yang bermaksud menerapkan syariat Islam secara formal di Indonesia. Dalam gerakannya JIL merumuskan empat tujuan. *Pertama*, memperkuat landasan demokrasi lewat penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusivisme, dan humanisme. *Kedua*, membangun kehidupan keberagaman yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan. *Ketiga*, mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan (utamanya Islam), yang pluralis, terbuka, dan humanis. *Keempat*, mencegah pandangan-pandangan keagamaan yang militant dan prokekerasan tidak menguasai wacana publik.¹⁵

Pada dasarnya, kehadiran para intelektual Islam Liberal pada pertengahan 1990-an ini memiliki garis kesinambungan ideologis maupun sosiologis dengan gerakan Islam terdahulu yang sering dinamakan gerakan Islam Tradisional dan Islam Modern yang muncul pada awal abad ke-20. Pemikiran tradisional dan modern yang di wakili *mainstream*-nya oleh NU dan Muhammadiyah, dalam perjalanan sejarahnya telah memunculkan gairah pemikiran baru melalui pembacaan kritis terhadap tradisi mereka sendiri: di Muhammadiyah mereka melakukan kritik terhadap bangunan nalar Muhammadiyah; dan di NU juga melakukan kritik terhadap bangunan nalar NU. Kritisisme mereka melampaui teks. Mereka melakukan penafsiran, bahkan dekonstruksi pemikiran. Generasi baru yang kritis itu lalu memunculkan kelompok-kelompok progresif yang melahirkan pembaruan-pembaruan melalui sekelompok generasi 90-an.¹⁶

Dari rahim NU dan Muhammadiyah ini lahirlah komunitas-komunitas Islam Liberal yang memiliki fokus dan strategi yang ber beda di antara satu dan

¹⁴ Dedy Jamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim. "Zaman Baru Islam Indonesia." (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 2001 Cetakan Ke II), h. 67.

¹⁵ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 8.

¹⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*, h. 14.

lain, dan mereka terus memperluas isu-isunya sejalan dengan perkembangan ide-ide baru, namun sebenarnya mereka masih berada dalam tradisi moderat kedua organisasi massa ini. Di era pasca reformasi, ketika muncul banyak kelompok Islam Radikal, NU dan Muhammadiyah sering dianggap kelompok moderat dan dipercaya sebagai kekuatan *civil society* yang dapat meredam radi kalisme dan militanisme Islam yang muncul bersamaan dengan keterbukaan sosial politik era reformasi. NU dan Muhammadiyah memproduksi Islam yang moderat, inklusif, dan progresif. Dari sini kemudian NU dan Muhammadiyah menggerakkan para pendukungnya untuk memasuki lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat, baik itu pendidikan, sosial, politik, ekonomi maupun keagamaan. Berbeda dengan pendukung Islam fundamentalis atau radikal, pendukung NU dan Muhammadiyah relatif memiliki daya sebar yang tinggi sehingga mereka menerbitkan selebaran Jumat *al-Ikhtilaf*. Kemudian LAKPESDAM (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) NU Jakarta dengan jaringannya di seluruh Indonesia. Selain menerbitkan buku, mengadakan pelatihan, penelitian, dan pendampingan masyarakat, LAKPESDAM NU juga menerbitkan jurnal ilmiah *Tashwirul Afkar*, di mana gagasan-gagasan tentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme diadvokasikan pada pembacanya yang mayoritas adalah intelektual muda NU. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta telah mengembangkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme dalam bahasa pesantren. Dalam perjalanan organisasinya, P3M cukup berperan mendewasakan masyarakat khususnya kalangan NU yang berada di Pesantren dalam hal pemikiran progresif Islam, seperti pengembangan argumen Islam untuk sekularisme, liberalisme dan pluralisme.¹⁷

Belakangan Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) tidak bisa dikaitkan dengan NU meskipun beberapa orang dari kelompok ini adalah anak NU, bahkan menantu salah seorang tokoh NU. Juru bicara Forum Kiai Muda (FKM) Jawa Timur KH Abdullah Syamsul Arifin (Gus A'ab) menyatakan, NU mempunyai garis-garis yang jelas. Beliau menyatakan, keberadaan JIL sangat merisaukan warga NU, karena salah seorang pentolannya, Ulil Abshar-Abdalla adalah warga NU, Mereka mengadakan acara Forum

¹⁷ *Ibid*, h. 15.

Tabayyun dan Debat Terbuka berjalan cukup menarik diadakan di Pondok Pesantren Bumi Sholawat sidoarjo Tidak kurang dari 500 orang hadir dalam kesempatan itu. Mereka datang dari Jember, Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan dan Probolinggo. Seolah-olah forum itu menjadi tempat penumpahan uneg-uneg warga NU terhadap gagasan dan pemikiran Ulil mengenai Islam liberal yang diusungnya selama ini. Debat yang dimoderatori Kiai Abdurrahman Navis itu mengangkat dua pemikiran Ulil yang sangat kontroversial, yaitu soal pluralisme agama dan kesakralan Alqur'an. FKM diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan "uneg-uneg" terkait dengan pemikiran Ulil. Menurut Gus A'ab, tulisan-tulisan Ulil soal pluralisme agama patut disayangkan. Pasalnya, Ulil telah menyamaratakan semua agama. Menurut Gus A'ab, pemikiran Ulil yang menyatakan bahwa semua agama itu benar adalah salah besar. Yang betul, katanya, orang Islam wajib meyakini bahwa agama Islamlah yang benar, walaupun keyakinan itu tidak boleh sampai menghilangkan toleransi terhadap kebenaran agama lain sesuai keyakinan penganutnya.¹⁸

Dibandingkan pemikir muda NU, gerakan-gerakan sosial pemikir muda Muhammadiyah sangat ketinggalan dalam merintis LSM. Generasi muda NU telah merintis LSM sudah sejak tahun 1980-an, sedangkan fenomena demikian baru muncul di lingkungan Muham madiyah pada akhir dekade 1990-an. Pada periode kepemimpinan Ahmad Syafi'I Maarif, sedikitnya ada tiga komunitas intelektual Muhammadiyah yang muncul mewadahi pemikir muda progresif Muhammadiyah, yaitu Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), Maarif Institute, dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Munculnya kelompok ini mengawali babak baru perjalanan Muhammadiyah sebagai gerakan intelektual dan pemikiran baru Islam. Gerakan-gerakan ini awalnya masih terbatas di Jakarta, Yogyakarta dan Malang. Meski masih baru, namun lontaran-lontaran pemikiran kritisnya sudah mampu menarik perhatian publik, khususnya warga Muhammadiyah.¹⁹

PSAP Muhammadiyah awalnya ditangani oleh Pramono U. Tantowi dan kawan-kawan, merupakan lembaga studi yang meneguhkan komitmen untuk

¹⁸ <http://www.nu.or.id/post/read/19502/jil-tak-bisa-dikaitkan-dengan-nu> dikutip tanggal 6 Desember 2017

¹⁹ *Ibid*, h. 22.

mewujudkan masyarakat demokratis dan berkeadaban yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Maarif Institute for Culture and Humanity pada mulanya adalah suatu kepanitiaan yang akan mempersiapkan peringatan 70 tahun Ahmad Syafi'i Maarif dengan menerbitkan sejumlah buku tentang ataupun karya beliau. Tetapi mengingat adanya dinamika kebangsaan yang mengarah pada disintegrasi dan gerakan Islam modernis yang cenderung politiseksklusif, Maarif Institute ter panggil untuk mencari jalan baru bagi krisis tersebut dengan mengembangkan wacana Muhammadiyah sebagai "tenda bangsa", berupa konsolidasi kekuatan bangsa yang bersifat inklusif dan plural. Pemikir muda yang mengembangkan Maarif Institute sekarang adalah Raja Juli Antoni dan Fajar Riza ul-Haq.²⁰

Seringkali muncul tuduhan bahwa kubu liberal di dalam Muhammadiyah diwakili oleh Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Istilah liberal yang disematkan bagi mereka sebenarnya tidak tepat. Pasalnya, JIMM mengomfirmasi mazhab pemikiran liberasi sosial yang emansipatoris ketimbang liberalisasi pemikiran keagamaan. Lahirnya JIMM tidak terlepas dari pemikiran liberasi sosial yang berkembang di dalam induknya sendiri: Muhammadiyah. Sedikit banyak, memang JIMM mengambil manfaat dari pemikiran kritis Muhammadiyah, terutama teologi al-Ma'un dan manifestasinya melalui lembaga Penolong Kesengsaraan Omoem (PKO) sejak 1912 silam. Kini, tatkala dihadapkan dengan kenyataan merebaknya penyakit neo-liberalisme dan globalisasi, banyak di antara pemikir Muhammadiyah mulai menimbang-ulang gagasan yang pernah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan, yakni teologi al-Ma'un dan PKO. Kedua hal tersebut dianggap sebagai dasar pijak teologis yang begitu penting, karena mampu mempertahankan idealisme Islam yang berkhidmat dalam rangka menolong siapapun yang sengsara.²¹

²⁰ Mohamad Ali, *Islam Muda Liberal, Post-Puritan, Post-Tradisional*, (Yogyakarta: Apeiron Philotes, 2006), h. 104-105.

²¹ <http://islambergerak.com/2016/04/generasi-muhammadiyah-progresif-2/> dikutip tanggal 4 Desember 2017

Kaitan Perkembangan Pemikiran Keislaman Dengan Modernisasi Pendidikan Islam

Dari Pemikiran Radikalisme dan Liberalisme ternyata memberikan Pengaruh bagi Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, Partai Ikhwanul Muslim yang dianggap “Radikal” juga punya pengaruh Pendidikan secara Nasional di Indonesia. Dalam hal gerakan Pendidikan Islam pelajar atau mahasiswa Indonesia barangkali menjadi saluran kontemporer yang paling penting bagi ide-ide Islamis dari Timur-Tengah ke Indonesia. Ribuan pelajar Indonesia mendapat beasiswa dari negara-negara Islam Timur-Tengah untuk belajar di berbagai universitas terkemuka. Negara tujuan utama pelajar Indonesia menuntut ilmu Islam di Timur-Tengah adalah Arab Saudi dan Mesir. Ada juga yang belajar di Sudan, Libya, Qatar, Kuwait, Yaman, Tunisia, Syiria dan Iran. Namun, Perguruan Tinggi Islam Al-Azhar di Kairo Mesir dan perguruan Tinggi Islam di Mekkah dan Madinah adalah tujuan favorit pelajar Indonesia. Mereka ke Timur-Tengah untuk belajar kepada ulama-ulama terkemuka. Tidak hanya belajar materi-materi klasik ilmu keislaman seperti fiqih dan ushuluddin (teologi), namun juga belajar ide-ide Islamisme. Bagaimanapun, selama studi di Timur-Tengah, mereka punya kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok Islamis dan mengenal ide-ide atau ideologi mereka. Dua ideologi utama yang sangat menarik perhatian mereka adalah gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) yang tumbuh pertama kali di Mesir dan Gerakan Salafi di Arab Saudi. Kedua gerakan inilah yang pada akhirnya mulai banyak pengikutnya di Indonesia selain kedua aliran *mainstream* di Indonesia yakni Islam tradisional yang di wakili NU, serta Islam modernis yang diwakili Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Selain memberikan beasiswa pelajar Indonesia untuk belajar di Timur-Tengah, pemerintah negara-negara Timur-Tengah juga banyak mendirikan lembaga pendidikan atau menjadi donatur berbagai lembaga pendidikan yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad dan lain-lain. Lembaga-lembaga dan individu dari beberapa negara-negara Timur-Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Kuwait dan beberapa negara teluk lainnya sangat aktif bergerak dalam pendidikan dan dakwah di Indonesia, seperti mendatangkan dosen dari Perguruan Tinggi Al-

Azhar Mesir ke berbagai Sekolah Tinggi Islam, Universitas dan berbagai lembaga Islam di Indonesia. Yang mencengangkan, menurut satu sumber rahasia di Kementerian Agama Republik Indonesia, negara Iran sangat agresif sekali memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren serta memberikan beasiswa kepada ribuan pelajar Indonesia untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Iran. Tidak mengherankan jika perkembangan penganut Syiah dan lembaga pendidikannya berkembang sangat pesat di Indonesia. Contoh lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang disponsori negara Timur-Tengah adalah perguruan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang merupakan cabang Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi. Perguruan LIPIA berwatak salafi dengan tingkat yang beragam, namun banyak dipengaruhi oleh ideologi IM. Perguruan LIPIA telah banyak melahirkan alumni yang sukses, seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan mantan Presiden PKS, Anis Matta. Memang saat ini LIPIA sangat identik dengan para ikhwan yang aktif di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), walaupun tidak semua alumninya berafiliasi ke PKS. Para alumni LIPIA menjadi figur yang sangat berpengaruh dalam gerakan salafi di Indonesia, khususnya sebagai penerbit, dai, guru dan ulama. Banyak alumni LIPIA mendirikan pesantren salafi dengan dukungan dana dari Arab Saudi.²²

Demikian Juga wajah radikalisme di lembaga pesantren tidak pernah nyata dalam dinamika pesantren sejak abad ke-15 yang dipelopori Walisongo dan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya melalui ulama-ulama ternama, seperti Syekh Mutamakkin, Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Mahfud al-Tarmasi, KH. Hasyim Asyari, KH. Wahab Hasbullah, dan masih banyak lagi. Namun, sejak zaman reformasi ini wajah radikalisme pesantren muncul ke permukaan secara nyata. *Pertama*, Pondok Pesantren al-Islam, Lamongan terlibat dalam aksi pengeboman Bali yang dilakukan para alumni santrinya, seperti Muchlas dan Amrozi. *Kedua*, Pondok Pesantren al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo yang dicerminkan ustadz Abu

²² https://www.kompasiana.com/ridwan78/anatomi-radikalisme-islam-di-indonesia-bagian-pertama_569b7477c2afbfd60621f720 dikutip tanggal 6 Desember 2017

Bakar Ba'asyir sebagai tokoh utama, yang diduga ikut terlibat dalam beberapa aksi kekerasan di tanah air.²³

Dapat dipahami bahwa setidaknya ada dua hal yang menyebabkan proses radikalisasi di pesantren. Pertama, jaringan intelektual yang dilakukan pesantren modern berasal dari kawasan Timur Tengah yang berwatak keras, militan dan radikal, terutama ajaran Wahabi yang dibawa secara literal ke wilayah Nusantara. Purifikasi adalah produk nyata dari jaringan intelektual Wahabisme dalam bentuk pemberantasan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dalam proses selanjutnya, jaringan intelektual ini meluas, tidak saja berpatokan pada mazhab Wahabisme, tetapi juga mengambil ideologi radikal sejumlah intelektual; seperti Hasan al-Bana, Al-Maududi, Sayyid Qutb, Hasan Turabi, dan lainlain. Itu sebabnya, psikologi radikalisme yang bergolak di Timur Tengah benar-benar dipraktikkan di tanah air sebagai perjuangan luhur agama. *Kedua*, pengajaran agama yang eksklusif dan dogmatik telah melahirkan sikap permusuhan dengan kelompok di luarnya. Istilah Zionis-Kafir seakan menjelma menjadi kesadaran keagamaan untuk melawannya dalam bentuk apapun. Ditambah lagi dengan ideology jihad yang dipahami sebagai perang melawan kaum Zionis-Kafir, telah menambah deretan sikap radikal. Sehingga aksi kekerasan apapun yang dilakukan umat untuk menghancurkan Zionis-Kafir, yang mereka sebut sebagai musuh-musuh Islam, adalah perjuangan agama yang paling luhur (*syahid*). Pada dasarnya, pengajaran seperti ini tidak murni sebagai kesadaran otentik masyarakat Islam Nusantara, melainkan pengaruh dari jaringan intelektual dan ideologis yang dibawa dari Timur Tengah.²⁴

Sedangkan Liberalisme Juga punya pengaruh dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang bernuansa keindonesian, Konsep dan gagasan K.H Abdurrahman Wahid tentang pendidikan Islam secara jelas terlihat pada gagasannya tentang pembaruan pesantren. Menurutnya, semua aspek pendidikan pesantren, mulai dai visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen dan kepemimpinannya harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman

²³ Abd. Muin, *Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme*, (Jakarta: Prasasti, 2017), h. 20.

²⁴ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Radikal di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002), h. 92-95

era globalisasi. Meski demikian, menurut Gus Dur, pesantren juga harus mempertahankan identitas dirinya sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik. Dalam arti tidak larut sepenuhnya dengan modernisasi, tetapi mengambil sesuatu yang dipandang manfaat positif untuk perkembangan.²⁵ Pesantren sebagai komunitas keilmuan ikut berinteraksi dengan paradigma liberal. Ada dua hal yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat masuknya gagasan liberal di komunitas pesantren. *Pertama*, dilihat dari sudut pemikiran tokoh-tokoh atau pemimpin pesantren. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nama tokoh/pemimpin pesantren yang sudah bersentuhan dengan gagasan liberal, misalnya (alm.) KH. Abdurrahman Wahid, KH. Said Agil Siradj, KH. Masdar Farid Mas'udi. Tak ketinggalan pula, KH. Hussein Muhammad, sebagai satu-satunya ulama/kyai pesantren yang menekuni hubungan Islam dengan gender. *Kedua*, dilihat dari lembaga pesantren melalui santrisantrinya yang ikut meramaikan pergulatan diskursif Islam liberal. Sebut saja, Pondok Pesantren Ma'had Ali Situbondo yang berdiri 4 Agustus 1991 yang menurut Marzuki Wahid telah melakukan diskusi-diskusi wacana keagamaan kontemporer yang tidak lagi menampilkan wajah Islam yang tertutup dan konservatif, yang ditunjukkan dari beberapa indikator: 1) Berdirinya Fokus Kajian Ushul Fiqh pada tahun 1998. Kelompok kajian ini di samping mengkaji pemikiran *ushul fiqh* klasik, juga dilengkapi dengan pemikiran fiqh dan ushul fiqh yang lebih kontemporer, termasuk pemikiran Mahmoed Muhammad Thaha, Abdullahi Ahmed an- Na'im, Hasan Turabi, Jamal al-Banna, dll. 2) Pusat Studi Agama dan Filsafat, yang secara serius menyelenggarakan diskusi-diskusi filsafat, baik filsafat Islam maupun filsafat Barat. Pusat Studi ini akrab dengan pemikiran para tokoh non-Muslim yang dikenal berhaluan kiri, seperti pemikiran Mao, Karl Marx, Max Weber, dll. 3) Buletin mingguan "Tanwirul Afkar" membahas masalah kontemporer dengan analisis sosial dan analisis fihiyyah. Kini telah menjadi sebuah buku yang berjudul "Fiqh rakyat: Pertautan Fiqh dengan kekuasaan yang diterbitkan LKiS Yogyakarta."²⁶

Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan

²⁵ Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), h. 37

²⁶ Wahid, Marzuki. dkk (ed.), *Pesantren Masa Depan*, Bandung:Pustaka Hidayah. 1999) h. 45-47

Menteri Agama tentang peningkatan Mutu pendidikan pada madrasah. Melalui SKB ini, madrasah diharapkan memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional sehingga lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi karena tingkat mata pelajaran umum di madrasah sama mutunya dengan pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat. Dalam SKB juga dirumuskan mengenai batasan dan penjenjangan madrasah. madrasah di sini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Adapun penjenjangan madrasah meliputi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama. ”di Lebelisasi sebagai tokoh liberal” (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud).²⁷

Demikian juga dalam pendidikan tinggi Islam, Harun Nasution seorang tokoh dianggap berfaham liberalisme sewaktu menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1973-1984) dan kemudian diterapkan berangsur-angsur pada IAIN-IAIN lain. Perubahan tersebut diilhami baik oleh kebijakan pembangunan nasional yang mensyaratkan dimensi kehidupan keagamaan yang rasional dan dinamis, maupun oleh tradisi akademis Barat. Tidak dapat diragukan bahwa pengalaman Harun Nasution yang pernah belajar di al-Azhar dan meraih gelar doktor di Institute of Islamic Studies, Universitas McGill, Kanada, merupakan salah satu faktor yang mendorong pembaruan IAIN. Saat yang sama, perubahan itu menekankan bahwa IAIN harus menjadi lembaga pengembangan ilmu pengetahuan agama, bukan pusat doktrin Islam seperti pada periode sebelumnya.²⁸

²⁷ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 66.

²⁸ https://www.kompasiana.com/mamattew/belajar-islam-ke-barat-atau-membaratkan-islam_55284499f17e61ac328b4574 dikutip tanggal 6 Desember 2017

Sejarah panjang perguruan tinggi Islam di Indonesia, dari masa awal pendirian sekolah tinggi Islam, Universitas Islam Indonesia, kemudian yang tadinya fakultas agama di UII dinaikkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam, diikuti pendirian Akademi Dinas Ilmu Agama sampai pada penyatuan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN.

Munculnya gagasan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yakni transformasi IAIN menjadi UIN. Ada beberapa alasan yang diidentifikasi atas gagasan tersebut. Pertama, dengan bentuk institut, ruang lingkup hanya sebatas keilmuan dan pengkajian keIslaman saja. Kedua, wawasan mahasiswa dan dosen IAIN terbatas, berbeda halnya dengan universitas umum. Sehingga pengkajian Islam seolah terputus dari persoalan kontemporer yang aktual. Sehingga menuju transformasi lembaga tersebut menjadi harapan yang harus diwujudkan, agar kedua alasan tersebut dapat diselesaikan.²⁹

Gagasan tersebut bukan berarti langsung terwujud, karena tetap saja harus melalui berbagai persyaratan, kesiapan pemenuhan kebutuhan IAIN menjadi UIN dalam berbagai aspek; misalnya kegiatan akademis akan lebih besar pengelolaannya, lahan yang harus diperluas, kebutuhan tenaga dosen dan pegawai administrasi dan berbagai persiapan lainnya. Sampai awal 1998, terdapat tiga IAIN yang mengajukan proposal yakni IAIN Yogyakarta, Jakarta dan Bandung.

Dalam pandangan Azyumardi Azra juga dikatakan (salah satu arsitek penting dalam proyek perubahan IAIN ke UIN) bahwa gagasan dan konsep dasar pengembangan IAIN menuju UIN tak lepas dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN dalam perkembangannya selama ini. Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. IAIN lebih banyak berperan di masyarakat karena dalam konteks dakwah. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks.³⁰

²⁹ Abudin Nata (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 246.

³⁰ *Ibid*, h. 246.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa liberalisme hadir di Indonesia untuk membendung paham radikalisme. Pemikiran Radikalisme dan Liberalisme ternyata memberikan Pengaruh bagi Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, seperti Partai Ikhwanul Muslim yang dianggap “Radikal” juga punya pengaruh Pendidikan secara Nasional di Indonesia. Dalam hal gerakan Pendidikan Islam pelajar atau mahasiswa Indonesia barangkali menjadi saluran kontemporer yang paling penting bagi ide-ide Islamis dari Timur-Tengah ke Indonesia. Ribuan pelajar Indonesia mendapat beasiswa dari negara-negara Islam Timur-Tengah untuk belajar di berbagai universitas terkemuka. Negara tujuan utama pelajar Indonesia menuntut ilmu Islam di Timur –Tengah adalah Arab Saudi dan Mesir

Sedangkan Liberalisme juga punya pengaruh dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang bernuansa keindonesian, konsep dan gagasan tentang pendidikan Islam secara jelas terlihat pada gagasannya tentang pembaruan pesantren. Menurutnya, semua aspek pendidikan pesantren, mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen dan kepemimpinannya harus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman era globalisasi.

Daftar Pustaka

- A.Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007).
- Akhmad Elang Muttaqin, “Mengakrabi Radikalisme Islam” dalam Erlangga Husada, dkk. *Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).
- Abudin Nata (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 246.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Abd. Muin, *Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme*, (Jakarta: Prasasti, 2017).
- Budhy Munawar-Rachman. *Argumen Islam Untuk Liberalisme*. (Jakarta. Grasindo. 2010).
- _____, *Islam dan Liberalisme*, (Jakarta : Friedrich Naumann Stiftung, 2011).

Dedy Jamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim. *"Zaman Baru Islam Indonesia."* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 2001 Cetakan Ke II).

Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013).

Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995).

Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Radikal di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002).

Muh. Idris, Potret Pemikiran Radikal Jaringan Islam Liberal (JIL) Indonesia, kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014.

Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012).

Mohamad Ali, *Islam Muda Liberal, Post-Puritan, Post-Tradisional*, (Yogyakarta: Apeiron Philotes, 2006).

Wahid, Marzuki. dkk (ed.), *Pesantren Masa Depan*, Bandung:Pustaka Hidayah. 1999).

Zada Khammami, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonwsi*, (Jakarta: Teraju, 2002).

Zuly QodirIslam Liberal: *Paradigma Baru Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

<http://www.nu.or.id/post/read/19502/jil-tak-bisa-dikaitkan-dengan-nu> dikutip tanggal 6 Desember 2017

<http://islambergerak.com/2016/04/generasi-muhammadiyah-progresif-2/> dikutip tanggal 4 Desember 2017

https://www.kompasiana.com/ridwan78/anatomi-radikalisme-islam-di-indonesia-bagian-pertama_569b7477c2afbdf60621f720 dikutip tanggal 6 Desember 2017

https://www.kompasiana.com/mamattew/belajar-islam-ke-barat-atau-membaratkan-islam_55284499f17e61ac328b4574 dikutip tanggal 6 Desember 2017